



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 111 TAHUN 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN JABATAN PELAKSANA SEBAGAI KETUA TIM KERJA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi jabatan pelaksana dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien serta mewujudkan budaya kerja kolaboratif, kreatif, dan inovatif, diperlukan penunjukan ketua tim kerja bagi jabatan pelaksana;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, perlu ditetapkan jabatan pelaksana sebagai ketua tim kerja dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Jabatan Pelaksana sebagai Ketua Tim Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN JABATAN PELAKSANA SEBAGAI KETUA TIM KERJA.

- KESATU : Menunjuk Jabatan Pelaksana sebagai Ketua Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Jabatan Pelaksana sebagai Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
  - b. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;
  - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
  - d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
  - e. melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja; dan
  - f. melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim.
- KETIGA : Jabatan Pelaksana sebagai Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

**KEEMPAT** : Jabatan Pelaksana sebagai Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2025.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 Februari 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul; dan
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 111 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**JABATAN PELAKSANA SEBAGAI KETUA**  
**TIM KERJA**

**DAFTAR JABATAN PELAKSANA SEBAGAI KETUA TIM KERJA**

No	Nama	NIP	Jabatan	Perangkat Daerah/Unit Organisasi	Tim Kerja	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kharir Mahrur, S.IP.	198303132010011008	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tim Kerja Paskibraka	Terlaksananya kegiatan pembinaan paskibraka	Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan paskibraka	75 Orang
2	Pintoko Dewanto, S.IP.	196809161993031010	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tim Kerja Kewaspadaan Dini	Terlaksananya kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	350 Orang

No	Nama	NIP	Jabatan	Perangkat Daerah/Unit Organisasi	Tim Kerja	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Hana Purwantini, S.H.	199106132022032002	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tim Kerja Pelayanan Antar Kerja	Terlaksananya pelayanan antar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	2750 Orang
4	Yoga Nasa Prastyawan, S.H.	199705082022031003	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tim Kerja Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan	Terlaksananya kegengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan di Kabupaten Bantul	Jumlah perusahaan yang telah mengesahkan peraturan perusahaan	200 Dokumen pengesahan PP
5	Dewantoro, S.Tr.IP.	199812312021081002	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan BKK P2MK	Terpenuhinya jumlah dokumen penugasan urusan/kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa	Jumlah dokumen penugasan urusan/kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa	6 Dokumen
6	Anastasia Eni Rahayuningsih, S.Gz.	197410122000122003	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui P2WKSS, UP2PKK dan Pasar Desa	Terpenuhinya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 Dokumen

No	Nama	NIP	Jabatan	Perangkat Daerah/Unit Organisasi	Tim Kerja	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Herdianto, S.E.	197302222005011008	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Tim Kerja Fasilitasi Profil Desa	Meningkatnya pemerintah desa dalam memperbarui data	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	75 Dokumen
8	Irfan Budi Santoso, S.S.T., M.Eng.	198306242006041007	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tim Kerja Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya pelayanan informasi publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20 Permohonan
9	Jarot Achid Alvian, S.Kom.	199010102019021001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tim Kerja Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	5 Aplikasi
10	Orchidania Azizah, S.Si.	199804102022032009	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tim Kerja Pengumpulan Data SDI	Terselenggaranya statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	190 Dokumen
11	Romy Danan Hermawan, S.IP.	199301142016091001	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan ASN	Tersusunnya rencana kebutuhan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	2 Dokumen

No	Nama	NIP	Jabatan	Perangkat Daerah/Unit Organisasi	Tim Kerja	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Ayu Yuliana, S.Psi.	199407152020122021	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tim Kerja Fasilitasi Pembelajaran Terintegrasi ASN	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat	4 Dokumen
13	Sigit Jatmika Ari Wibowo, S.Tr.Gz.	198511282010011012	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tim Kerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Dokumen
14	Rengganis Sekar Wanandhi, S.Psi.	199210282020122013	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tim Kerja Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	50 Organisasi

No	Nama	NIP	Jabatan	Perangkat Daerah/Unit Organisasi	Tim Kerja	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Busrini Agustina Prihatini, S.Psi.	198901302022032001	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tim Kerja Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2871 Orang
16	Dedi Prasetio, S.T.	199510052022031002	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Lingkungan Hidup	Tim Kerja Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersedianya dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim	1 Dokumen
17	Galuh Pradnya Paramita, S.Si.	197708302006042005	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Lingkungan Hidup	Tim Kerja Penyelesaian sengketa lingkungan	Terlaksananya penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perkara
18	Yudhistira Susila Putra, S.STP.	199409042017081001	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Tim Kerja Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Tersusunnya dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	1 Dokumen

No	Nama	NIP	Jabatan	Perangkat Daerah/Unit Organisasi	Tim Kerja	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP, M.IP.	199501022018081001	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Tim Kerja Pengawasan produk hukum kalurahan	Terlaksananya pengawasan produk hukum Kalurahan tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum Kalurahan tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	1 Dokumen

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH